

UPAYA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) MENANGANI SEX TOURISM DI THAILAND (2009-2013)

By : Raesa Oktavia

raesaoktavia@gmail.com

Supervisor : Faisyal Rani, S.IP, MA

**Pogram Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293

Abstract

This research explain about the efforts of United Nations World Tourism Organization (UNWTO) in dealing with sex tourism in Thailand. This research focused explaining about the role of UNWTO to fix sex tourism problem in Thailand, because sex tourism is one of the most favorite tourism in the world. UNWTO focused to protect the children because they are the biggest victim on sex tourism. This research intended to show the role of United Nations World Tourism Organization to handle the sex tourism in Thailand. UNWTO did some cooperation with Thailand Government and some international organization also with non-governmental organization. Attempts have been made from UNWTO by establish children protection, however UNWTO cannot get into the sex tourism sector adulthood and transgender because there are so much obstacles related to human rights.

Keywords : Effort, UNWTO, Sex Tourism, Human Trafficking and Prostitution

and Transgender atau biasa disebut dengan LGBT.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai upaya *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) menangani *sex tourism* di Thailand. UNWTO merupakan salah satu bagian dari *United Nations* yang berperan di bidang Pariwisata dan bertanggung jawab dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan dapat diakses secara universal. UNWTO juga berperan dalam menangani masalah eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dan eksploitasi seksual wanita. Pariwisata seks tidak hanya melibatkan perempuan dan anak-anak dibawah umur saja, tetapi juga melibatkan kaum *Lesbian, Gay, Bisexual*,

Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan mengenai upaya dari UNWTO dalam menangani pariwisata seks di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara bagian Asia Tenggara yang juga merupakan negara berkembang. Thailand memiliki tingkat kemiskinan yang tidak sedikit sehingga banyak dari masyarakat Thailand yang menggantungkan pendapatan keluarganya dari bidang pariwisata. Secara geografis Thailand terletak di wilayah yang memiliki perairan yang indah. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Thailand untuk menarik minat para wisatawan dunia untuk berkunjung. Selain alamnya yang indah, Thailand juga

menjadi salah satu tujuan wisata favorit karena menawarkan harga-harga yang terjangkau, baik harga makanan, hotel, maupun kendaraan antar kotanya. Thailand juga memiliki kebudayaan yang unik yang patut untuk dinikmati.

Akan tetapi, pada saat sekarang ini Thailand lebih terkenal dengan pariwisata seks nya. Pariwisata seks yang ditawarkan di Thailand bermacam-macam, dimulai dari seks heterogen yang menawarkan jasa pelayanan seksual dari perempuan, seks anak yang menawarkan pelayanan seksual dari anak-anak dibawah umur, serta menawarkan pariwisata seks bagi kaum LGBT yang merupakan kaum minoritas.

Adanya pariwisata seks kemudian menyebabkan berkembangnya perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersil¹. Akibat dari perdagangan manusia tersebut, maka secara tidak langsung sektor pariwisata menciptakan permintaan terhadap jasa seks. Sehingga akan tampak adanya keterkaitan antara pariwisata internasional dengan perdagangan manusia. Perserikatan bangsa-bangsa memiliki organisasi tersendiri yang bertugas dalam mengurus masalah pariwisata dunia yaitu UNWTO. Perkembangan pariwisata yang semakin besar terutama pariwisata seks yang mengakibatkan meningkatnya jumlah perdagangan manusia dan eksploitasi seksual sudah seharusnya menjadi perbincangan serta pertimbangan di dalam UNWTO tersebut.

Teori Peran Organisasi Internasional

Pembahasan kerangka dasar teori ini dikemukakan dengan menjelaskan, teori dan tingkat analisa, serta konsep-konsep yang penulis gunakan yang relevan terhadap pembahasan mengenai upaya UNWTO dalam menangani pariwisata seks di

Thailand. Penelitian ini memaparkan paradigma, teori, dan tingkat analisa terdahulu yang berkaitan guna memberikan gagasan dan kerangka berfikir yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori organisasi, dalam hal ini organisasi internasional, yang akan menjadi dasar dalam analisis penulis terhadap masalah penelitian. Mengacu pada teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer,² ada tiga peran utama dari IGO. Peran yang *pertama* adalah sebagai *instrument* atau perangkat. Seperti pernyataan Gunnar Mydal, Mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa³ :

The basic fictitious notion about inter-governmental organizations, as conveyed by their constitutions, is that they are something more than their component parts: something above the national states. In the typical case international organizations are nothing else than instruments for the policies of individual governments, means for the diplomacy of a number of disparate and sovereign national states. When an intergovernmental organization is set up, this implies nothing more than that between the states a limited agreement has been reached upon an institutional form for multilateral conduct of state activity in a certain field. The organization becomes important for the pursuance of national policies precisely to the extent that such a multilateral co-ordination is the real and continuous aim of national governments.

Apa yang telah disampaikan oleh Mydal telah jelas menerangkan bahwa negara menggunakan IGO sebagai

¹ Sirirat Pusurinkham, *Child Prostitution in Thailand*, terdapat di <http://www.thewitness.org/agw/pusurinkham.121901.html> diakses pada 17 November 2014

² Clive Archer, *International Organisations*, 3rd Edition, New York: Routledge, 2001, hal 68-79

³ *Ibid.* hal 69

instrumen diplomasi terhadap negara lain. Karena pada dasarnya yang membentuk IGO itu sendiri adalah negara yang berkepentingan dalam suatu hal yang juga bersinggungan dengan kepentingan negara lain. Mydal mengambil contoh Amerika Serikat pada masa Perang Dingin yang menggunakan PBB sebagai pencegah perluasan paham komunis di Eropa Timur oleh Uni Soviet dan Timur Tengah, menjadi penjaga pembangunan negara baru yang merdeka seperti Indonesia dan Israel atas tekanan masing-masing dari Belanda dan Arab Saudi, menjaga Korea Selatan dari pengaruh Korea Utara dan Komunis Cina. Begitu juga bagi Uni Soviet, PBB merupakan instrumen bagi negara tersebut untuk mempertahankan wilayah hegemoninya dari Barat yang bertujuan anti-komunis yakni dengan hak veto. Negara dunia ketiga pun juga muemulai untuk menggunakan IGO sebagai instrumen dan teknik baru dalam diplomasi mereka.

Peran *kedua* dari IGO adalah sebagai *arena* atau forum dimana negara anggota mengadakan komunikasi untuk membuat persetujuan, kerjasama atau bahkan pertentangan. Arena itu sendiri bersifat netral, karena pada arena dapat dilaksanakan pembicaraan mengenai perdamaian dan juga perang atau agresi. Stanley Hoffman, menyatakan tentang peran dari IGO yakni⁴:

As an arena and a stake it has been useful to each of the competing groups eager to get not only a forum for their views but also diplomatic reinforcement for their policies, in the Cold War as well as in the wars for decolonization.

Pernyataan Hoffman ini, dapat dilihat bahwa negara dapat menggunakan IGO sebagai tempat bagi negara tersebut untuk mengedepankan kepentingan, menunjukkan sudut pandang, serta meyakinkan

keyakinannya di depan forum yang terbuka. Di IGO-lah tempat terciptanya kesepakatan maupun ketidaksepakatan tentang suatu agenda. Peran *ketiga* dalam IGO adalah sebagai *actor*. Dalam perannya sebagai aktor, IGO memiliki sifat independen dari pengaruh-pengaruh dari luar dalam membuat suatu kebijakan. Arnold Wolfer menjelaskan bahwa⁵:

When this happens, these entities become actors in the international arena and competitors of the nation-state. Their ability to operate as international or transnational actors may be traced to the fact that men identify themselves and their interests with corporate bodies other than nation-states.

Pernyataan Wolfer ini menjelaskan bahwa IGO memiliki kapasitas sebagai aktor yang ditentukan oleh rekomendasi, resolusi, atau mandat pada saat pembentukan organisasi itu. Inis Claude menambahkan lagi bahwa peran IGO sebagai aktor semakin terlihat ketika IGO itu memiliki entitas yang berbeda dari negara-negara anggotanya. Dalam hal ini contohnya PBB memiliki peran tersendiri yang berbeda dengan peran dari negara-negara anggotanya. Misalnya adalah misi kemanusiaan di negara yang sedang berkonflik dan juga wewenang-wewenang lain yang terkait dengan perbedaan peran.

UNWTO merupakan organisasi bentukan dari PBB yang berwenang dalam menangani permasalahan mengenai pariwisata. Apabila dilihat dari ketiga peran yang disebutkan tadi, UNWTO merupakan peran ketiga dimana UNWTO merupakan actor dalam permasalahan pariwisata yang kemudian didukung oleh PBB. UNWTO dibentuk dengan tujuan sebagai organisasi internasional yang menangani mengenai pemasaran, publikasi, serta badan penyelesaian konflik dalam industry pariwisata.

⁴ *Ibid.* hlm 74

⁵ *Ibid.*

Sex Tourism di Thailand

Thailand merupakan negara gajah putih yang dikenal religious dengan beragam peninggalan bersejarah umat Budha yang mengedepankan kesopanan dan adat istiadat nilai-nilai kesusilaan yang tinggi. Thailand termasuk ke dalam sepuluh negara tujuan pariwisata terfavorit di dunia menurut UNWTO karena kekayaan wisata kuliner, sumber daya alam yang luar biasa, keindahan peninggalan bersejarah umat Budha, kualitas sutera yang indah serta pusat perbelanjaan yang murah. Akan tetapi Thailand juga merupakan tujuan pariwisata seks yang sangat digemari oleh wisatawan asing. Thailand merupakan negara penerima, negara transit sekaligus penyalur anak-anak, wanita maupun pria untuk dipekerjakan di bidang industri seks.

Thailand tidak hanya menawarkan wisata seks untuk kaum heteroseksual tetapi juga bagi kaum homoseksual. Industri seks di Thailand merupakan salah satu penyokong terbesar devisa negara. Kebijakan pemerintah setempat memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor pariwisata, sehingga banyak orang berusaha melakukan sesuatu yang dapat menarik minat turis asing berkunjung ke negara tersebut. Harga yang ditawarkan untuk pariwisata seks pun tergolong murah belum lagi Thailand juga menawarkan kepuasan seks bagi kaum minoritas atau LGBT. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya klub malam khusus bagi para komunitas homoseksual tanpa harus khawatir dikucilkan dari masyarakat setempat.

Kebijakan Pemerintah Thailand Mengenai Sex Tourism

Thailand merupakan salah satu negara anggota UNWTO⁶ yang juga ikut meratifikasi undang-undang perlindungan anak dalam eksploitasi anak. Thailand

menerapkan aturan melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi. Pada pertemuan di Berlin, Jerman negara-negara UNWTO menyepakati beberapa aturan mengenai masalah perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur masalah perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak⁷. Aturan ini merupakan aturan yang telah disepakati dalam beberapa kali konvensi internasional yang diadakan oleh PBB beserta organisasi internasional dan LSM setempat. Pada dasarnya Thailand memiliki undang-undang mengenai perlindungan anak dalam hal eksploitasi komersial anak tetapi Thailand tidak memiliki undang-undang khusus terkait eksploitasi seksual komersial wanita dan waria.

Menurut aturan negara, para pekerja seks komersial usia diatas 18 tahun tidak dapat dilindungi oleh negara. Walaupun Thailand tidak melegalkan prostitusi di negaranya, tetapi pemerintah Thailand juga tidak melarang secara tegas masalah prostitusi ini. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja seks komersial yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil prostitusi serta banyaknya permintaan dari para pelaku prostitusi yang apabila dilarang maka akan melumpuhkan perekonomian banyak masyarakat.⁸ Banyak masyarakat Thailand yang melakukan kegiatan prostitusi dengan alasan

⁷ 28th meeting of the World Tourism Network on Child Protection (Formerly the Task Force for the Protection of Children in Tourism) 8 March 2013, 2.00 – 5:00 p.m. ITB Berlin- International Conference Center (ICC), Hall 7 Messe Berlin, Neue Kantstrasse, D-14055 Berlin, terdapat di http://dtxqt4w60xqpww.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/report_itb2013_children_network_wtn_28th_meeting_final_0.pdf diakses pada 15 Januari 2015

⁸ Michaela Re, 2002, *The Global-Local Nexus of Western Male Sex Tourism in the South -a case study of Thailand*, Master's Programme in East and Southeast Asian Studies Department of Political Science, Lund University: Lund, terdapat di <http://www.ekh.lu.se/media/ekh/forskning/mfs/7.pdf> diakses pada 15 Januari 2015

⁶ Loc. Cit UNWTO highlight

menghidupi keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. Kemiskinan di Thailand menyebabkan banyaknya wanita bahkan anak-anak di Thailand yang menyerah pada keadaan dan memutuskan masuk ke dunia prostitusi.

Program UNWTO di Thailand

*Konvensi Internasional Mengenai Hak Asasi Anak dan Perlindungan Anak*⁹

United Nation World Tourism Organization (UNWTO) bertanggungjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan pariwisata dunia termasuk masalah dan resiko yang timbul dalam pariwisata. *Sex tourism* merupakan salah satu bidang pariwisata yang sudah seharusnya juga termasuk kedalam tanggung jawab UNWTO. Dampak yang ditimbulkan dari adanya *sex tourism* adalah peningkatan kasus perdagangan manusia. Kebanyakan dari korban eksploitasi seks adalah anak-anak dan perempuan. Anak-anak berusia 13-17 tahun merupakan korban angka penjualan terbanyak. Anak-anak dibawah umur ini menjadi korban eksploitasi seksual, sehingga UNWTO mengadakan konvensi internasional terkait masalah perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan langkah awal yang dirasa penting untuk mengatasi permasalahan eksploitasi ini.

Sebuah inisiatif WTO pada Kongres Stockholm melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak-anak sehingga menghasilkan penciptaan *Task Force International* terhadap seksual komersial eksploitasi anak, dengan wakil-wakil dari pemerintah, LSM dan pariwisata industri. *Task Force* terlibat dalam kampanye internasional yang berusaha untuk mencegah, mengungkap, mengisolasi, dan memberantas eksploitasi anak-anak dalam pariwisata seks. Pada pertemuan pertama pada bulan Maret 1997 (Berlin / Chantilly), *Task Force* setuju untuk mengadopsi dan

menggunakan logo seragam untuk kampanye internasional dan kegiatan menentang eksploitasi seksual komersial anak. Logo yang dipilih awalnya dirancang oleh embratur Brasil dan digunakan oleh negara ini dalam kampanye nasionalnya sendiri menentang eksploitasi seksual komersial anak. Atas permintaan WTO, pemerintah Brasil sepakat membagi logo ini untuk kampanye internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh sektor pariwisata, pemerintah, dan LSM memperjuangkan perlawanan terhadap eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu agenda WTO. Agenda Aksi WTO meliputi sektor: kerjasama, pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan partisipasi pekerjaan pemuda.

Kampanye Internasional UNWTO Terhadap Perlindungan Anak-Anak dari Sex Tourism Dalam Program Protect Children Awareness Campaign

Pariwisata di seluruh dunia mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu pula kebutuhan untuk memberantas eksploitasi pekerja anak dan eksploitasi seksual dalam industri perjalanan global, itu sebabnya badan PBB untuk pariwisata mengambil aksi dalam masalah penanganannya. Totalnya dari 218 juta anak-anak diperkirakan akan terlibat dalam pekerjaan di seluruh dunia, sementara jutaan sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan, menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO).¹⁰ Sebuah kampanye kesadaran baru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dan Satuan Tugas untuk Melindungi Anak dalam Pariwisata (*Task Force to Protect Children in Tourism*) akan mengangkat profil anak-anak yang dieksploitasi. UNWTO sangat percaya bahwa industri pariwisata memiliki

⁹ *Op.Cit* 28th Meeting

¹⁰ Unwto protect children campaign terdapat di [Http://Ethics.Unwto.Org/En/Content/Protect-Children-Campaign](http://Ethics.Unwto.Org/En/Content/Protect-Children-Campaign) diakses pada 12 Januari 2015

kewajiban moral dan tanggung jawab khusus untuk memerangi pekerja anak, eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Organisasi ini mendorong industri untuk menegakkan Kode Etik Pariwisata Global, dan melindungi anak-anak terhadap bahaya. Kampanye menekankan bahwa perdagangan anak merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi meskipun dalam berbagai alasan. Secara resmi kampanye ini diluncurkan pada World Travel Market (WTM) pada pertemuan ke-23 Satuan Tugas Internasional, London pada 10 November 2008, dan secara global pada Hari Anak Universal tanggal 20 November melalui upaya bersama dan terkoordinasi oleh semua mitra, peserta dan pendukung. Kampanye sudah mendapatkan dukungan luas dari pemerintah nasional, badan pariwisata, badan-badan PBB lainnya serta mitra dari sektor publik dan swasta.¹¹

Kerjasama UNWTO dengan Youth Career Initiative (YCI) dalam Program Pengembangan Pemuda di Thailand

Youth Career Initiative (YCI) adalah program pendidikan yang pertama kali didirikan pada tahun 1995 di Bangkok, Thailand. Program ini awalnya merupakan kemitraan yang dinamis antara *Pan Pacific Hotel Group* dengan UNICEF Thailand program ini merupakan program yang disediakan bagi pemuda-pemuda yang kurang beruntung untuk memberdayakan mereka menjadi lebih layak.¹² Pada awalnya program ini dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi eksploitasi seksual remaja dan anak-anak yang berada di angka kemiskinan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan peserta muda untuk membuat pilihan informasi karir dan menyadari pilihan yang tersedia bagi

mereka, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka dan meningkatkan kesempatan sosial dan ekonomi mereka secara jangka panjang. Setiap program disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dari pemuda dan YCI merupakan alat untuk mengatasi atau mencegah masalah-masalah seperti pengangguran kaum muda, pengucilan sosial, kemiskinan, dan eksploitasi. Calon yang memenuhi syarat biasanya berusia antara 18-21 tahun. Peserta harus mampu menunjukkan kemauan untuk belajar dan keinginan untuk pengembangan diri tetapi tidak memiliki cara lain untuk memperbaiki kehidupan mereka, ini berarti bahwa mereka terbatas atau tidak ada kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sah atau melanjutkan pendidikan.

Selama lima belas tahun terakhir sekitar 30 hotel telah bergabung dalam program ini di Bangkok. Sekitar 1.200 pemuda di Thailand telah lulus program ini untuk kemudian bekerja di sektor perhotelan, bahkan ada yang bekerja di sektor keperawatan atau memutuskan untuk melanjutkan program di bidang pendidikan lainnya. Siklus pelatihan biasanya berlangsung dari bulan maret hingga bulan September.¹³

Pemerintah Thailand harus berurusan dengan tantangan sosial yang beragam dan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat dan juga tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 4,3% (laporan tahun 2012)¹⁴ sementara itu bidang pariwisata menghasilkan 19,5% dari GDP nasional pada tahun 2013. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sektor pariwisata memainkan peranan yang stabil dalam perekonomian lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di Thailand.

Pemerintah berusaha menggunakan peluang pariwisata ini sebagai sarana untuk

¹¹ *Ibid*

¹² *Youth Career Initiative (YCI) Thailand*, terdapat di <http://www.youthcareerinitiative.org/country/thailand> / diakses pada 12 Januari 2015

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, *Spothlight in Thailand* pg.

mengurangi tingkat kemiskinan di Thailand dan menyalurkan pemuda yang berkompeten dalam bidang ini. Hal ini menyebabkan pemerintah bekerjasama dengan UNWTO dan YCI di Thailand untuk mengadakan program pemberdayaan pemuda di Thailand sehingga dapat mengurangi tingkat eksploitasi seksual anak dan mengurangi angka pariwisata seks anak-anak dan remaja di Thailand. UNWTO berharap dengan pengurangan angka pariwisata seks anak dan remaja diharapkan juga dapat mengurangi tingkat pariwisata seks di Thailand.

Kesepakatan Dalam Code of Conduct for The Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism

Kode Etik pada awalnya dikembangkan untuk menargetkan operator tur. Kode ini terdiri dari enam kriteria, yang di kembangkan ECPAT Swedia bersama-sama dengan operator tur Nordik dan Organisasi Pariwisata Dunia, untuk kegiatan tur operator mereka yang sama berkenaan dengan memerangi eksploitasi seksual komersial anak.¹⁵ Pedoman Perilaku didasarkan pada Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan PBB Konvensi Hak Anak, dengan penekanan pada Pasal 34.

*Kerjasama UNWTO dengan Childsafe Network's Centre for Children at Risk of Abuse*¹⁶

Childsafe network adalah jaringan yang awal mulanya di mulai dari *World Childhood Foundation's partners* di Kamboja yang kemudian berkembang menjadi *Friends-International* pada tahun

2005 yang berfungsi sebagai informasi dan kesadaran masyarakat untuk mengambil tindakan dalam permasalahan perdagangan anak yang berdampak buruk terhadap masa depan dunia. Jaringan ini kemudian menjadi bagian dari kegiatan organisasi dunia yang bekerjasama di Bangkok, Thailand.

Childsafe network (CN) ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan protektif bagi anak-anak yang terpinggirkan dan pemuda jalanan serta anak-anak yang memiliki resiko tinggi dalam tindakan pelecehan seksual. CN ini berusaha untuk mendorong tindakan positif dari masyarakat lokal maupun internasional untuk bertindak dalam hal perlindungan anak terkait masa depan yang lebih baik. CN bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional terkait serta LSM demi mencegah perkembangan perdagangan anak.

Melindungi anak-anak merupakan kewajiban dan respon alami yang ditunjukkan bagi pemerintah, LSM maupun individu. Misi utama dari CN yaitu melakukan perlindungan terhadap anak-anak dan pemuda serta keluarganya, mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak-anak dan mempengaruhi semua tingkatan masyarakat untuk ikut serta dalam perlindungan anak-anak. Hal yang dilakukan oleh CN bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional. Kampanye merupakan salah satu tindakan CN dalam mempengaruhi masyarakat setempat untuk peduli akan bahaya dari perdagangan anak dan mencanangkan perlindungan anak di Thailand. Logo kampanye yang digunakan oleh CN sesuai dengan organisasi masing-masing yang ikut kerjasama dalam hal ini. CN berfungsi sebagai jembatan bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk kontak langsung dengan anak-anak jalanan dan pemuda putus sekolah. CN dikordinasi oleh *Friend-International* dan konsep CN disesuaikan berdasarkan lembaga dan organisasi yang bekerjasama.

¹⁵ Ecpat International.2003. Code Of Conduct For The Protection Of Children From Sexual Exploitation In Travel And Tourism. Steering Committee Secretariat: Camelia Tepelus – C/O World Tourism Organization [Pdf]. Terdapat di: [Http://Www.Ecpat.Net/Ei/Publications/Cst/Code_Of_Conduct_Eng.Pdf](http://Www.Ecpat.Net/Ei/Publications/Cst/Code_Of_Conduct_Eng.Pdf) diakses pada 12 Januari 2015

¹⁶ Childsafe Network,2010,*Childsafe Network's Charter* terdapat di http://www.friends-international.org/resources/charter/CS_Charter.pdf diakses pada 15 Januari 2015

Simpulan

Upaya UNWTO dalam menangani *sex tourism* di Thailand adalah dengan melakukan beberapa program seperti : mengadakan konvensi internasional mengenai hak asasi anak dan perlindungan anak, kampanye Internasional UNWTO terhadap perlindungan anak-anak dari *sex tourism* dalam program *protect children awarenees campaign*, kerjasama UNWTO dengan *Youth Career Initiative* (YCI) Dalam Program Pengembangan Pemuda di Thailand, kesepakatan dalam *code of conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism*, serta kerjasama UNWTO dengan *Childsafe network's centre for children at risk of abuse*.

UNWTO melakukan penanganan terhadap masalah *sex tourism* di Thailand dengan cara menetapkan perlindungan terhadap anak-anak karena kebanyakan yang menjadi korban dari *sex tourism* ini adalah anak-anak dibawah umur. Perlindungan hak anak diharapkan dapat mengurangi angka perdagangan manusia dan pariwisata seks di Thailand. Pariwisata seks di Thailand pada dasarnya tidak hanya Pariwisata seks anak, tetapi juga wanita bahkan waria serta menawarkan pariwisata seks bagi kaum homoseksual. Namun UNWTO belum dapat masuk kedalam sektor pariwisata seks usia dewasa dan waria dikarenakan masih banyaknya kendala dan terhambat terhadap hak asasi manusia yang menyatakan bahwa semua manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan kesenangan serta hak untuk memilih hidup masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Acrher, C. (2001). *International Organization, 3rd Edition*. New York: Routledge
- Amazing Thailand. *Tentang Thailand*. terdapat di <http://id.tourismthailand.org/Thailand> diakses pada 17 November 2014
- Bennet, Leroy. 2001. *International Organizations: Principles And Issues* (7th Edition)
- Biermann, Frank & Steffen Bauer. *Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organization in International Environmental Politics*. Hlm. 189-193, diakses di <http://glogov.net/images/doc/BiermannReplaceWP15.pdf> pada 19 Februari 2013
- Budiardjo, M. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- David L. Sills ed., 1972. *International Encyclopedia of The Social Sciences Volume 7*. New York: The Macmillan Company & The Free Press
- Dewi Dermawan Manurung, 2011, *Peran End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose (ECPAT) dalam Pemberantasan Pariwisata Sex*. S1 Universitas Riau : Pekanbaru
- Eck, Diana L. *What is pluralism*. terdapat di http://pluralism.org/pages/pluralism/what_is_pluralism diakses pada 10 November 2014

- ECPAT International. 2008. *Memerangi Pariwisata Seks Anak : Tanya & Jawab*. [pdf] Indonesia: Restu Printing. Terdapat di: <http://www.eska.or.id> diakses pada 15 November 2014
- ECPAT International. 2009. *The protection of children from sexual exploitation in tourism and the role of tourism professionals, NGOs and law enforcement*. [pdf] Amsterdam: ECPAT the Netherlands Publications
- ECPAT International. 2003. *Code Of Conduct For The Protection Of Children From Sexual Exploitation In Travel And Tourism*. Steering Committee Secretariat: Camelia Tepelus – C/O World Tourism Organization [Pdf]
- KBBI, *Upaya*, terdapat di <http://kbbi.web.id/upaya> diakses pada 17 November 2014
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Mastny, Lisa. 2001. *Traveling Light : New Paths for International Tourism*. London : Worldwatchpaper 159
- Mayang Sari, 2011, “Ketidakefektifan United Nations Human Rights Council (UNHRC). Studi Kasus: Pelanggaran HAM di Tibet (2008-2009)”, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Pekanbaru: Universitas Riau
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya
- Nations Online, Political Map of Thailand, terdapat di <http://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand-region-map.htm> diakses pada 17 November 2014
- Pongpaijit, Pasuk and Sangsit Piryarangan of The Economics Department of Chulalongkorn university. Parith Lapongpaiboon. *Plan for Illegal Work Proposed*. The Nation, 1 July 1997. Terdapat di <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm> diakses pada 17 November 2014
- Seto Nu-Wen, 'Special US Police Unit Spies on Suspected Paedophiles'. The Electronic Newspaper, 21 August 2005
- Singer, J. David, “The Level of Analysis Problem in International Relations” dalam *World Politics*, Vol. 14, No. 1, The International System: Theoretical Essays. (Oct., 1961), hlm. 80. Diakses di <http://links.jstor.org/sici?sici=0043-8871%28196110%2914%3A1%3C77%3ATLPIIR%3E2.0.CO%3B2-T> pada 21 Februari 2011
- Sirirat Pusurinkham, *Child Prostitution in Thailand*. terdapat di <http://www.thewitness.org/agw/pusurinkham.121901.html> diakses pada 17 November 2014
- The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language: Encyclopedic Edition
- World Tourism Organization UNWTO, *Who We Are*, terdapat di

<http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0> diakses pada 17 November 2014